



BADAN KESBANGPOL

BerAKHLAK'
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**Sulbar
MajuTerus**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



LAPORAN LKiJP TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LKjIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, Olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, 31 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19700701 199101 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
✚ Tugas dan Fungsi.....	4
✚ Struktur Organisasi.....	11
C. Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	11
D. Sumber Daya Manusia.....	14
E. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	16
F. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT.....	19
A. Perencanaan Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1. Kerangka Pengukuran.....	25
2. Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja.....	26
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV. PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi dan Saran.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Daftar Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.	
2. Daftar Surat KeteranganTerdaftar (SKT) dan Surat Keterangan Keberadaan (SKK) Ormas Tahun 2024.	
3. Laporan Realisasi Keuangan Periode Januari s/d Desember 2024.	

DAFTAR BAGAN & TABEL

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
B.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
Bagan	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	11
C.	Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	11
Tabel 1.1	Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.....	12
Tabel 1.2	Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Bantuan Keuangan Partai Politik.	12
Tabel 1.3	Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Jumlah Ormas yang memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Provinsi Sulawesi Barat.....	13
D.	Sumber Daya Manusia.....	14
Tabel 1.	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Menurut Golongan.....	14
Tabel 2.	Banyak Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024.....	15
Tabel 3.	Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	15
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT.....	18
A.	Perencanaan Strategis.....	18
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	20-21
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	21
C.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	23
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	23-34
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	25
A.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	25
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
A.2	Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja.....	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	26
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	27
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	28

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4..... 29-30

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5..... 31

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6..... 33

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7..... 34

Tabel 3.9 Kegiatan-Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2024..... 35

B. Realisasi Anggaran..... 37

Tabel 3.10 Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 1..... 37

Tabel 3.11 Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 2 & 3..... 38-39

Tabel 3.12 Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 4 & 5..... 39-40

Tabel 3.13 Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 6..... 40

Tabel 3.14 Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 7..... 41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang

nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 Tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan

politik.

 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
- e. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

 Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- c. Bidang Politik Dalam Negeri
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- f. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan revormasi birokrasi badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Barat ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi dan persuratan ;
- c. Melaksanakan tata usaha pimpinan ;
- d. Melakukan pengarsipan terhadap dokumen dan administrasi persuratan ;
- e. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler ;
- f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan;
- g. Pengelolaan Aset, dan dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- i. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan Revormasi birokrasi badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Barat;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

- 1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka;
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;

- f. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan purna paskibraka duta Pancasila, pelaksanaan tugas paskibraka duta Pancasila, pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka, pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta Pancasila; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan, dan Karakter Bangsa Terdiri Atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Politik Dalam Negeri.

- 1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- 2) Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

- 1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- 2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan), di daerah Provinsi.
- 2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap

potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan), di daerah Provinsi;

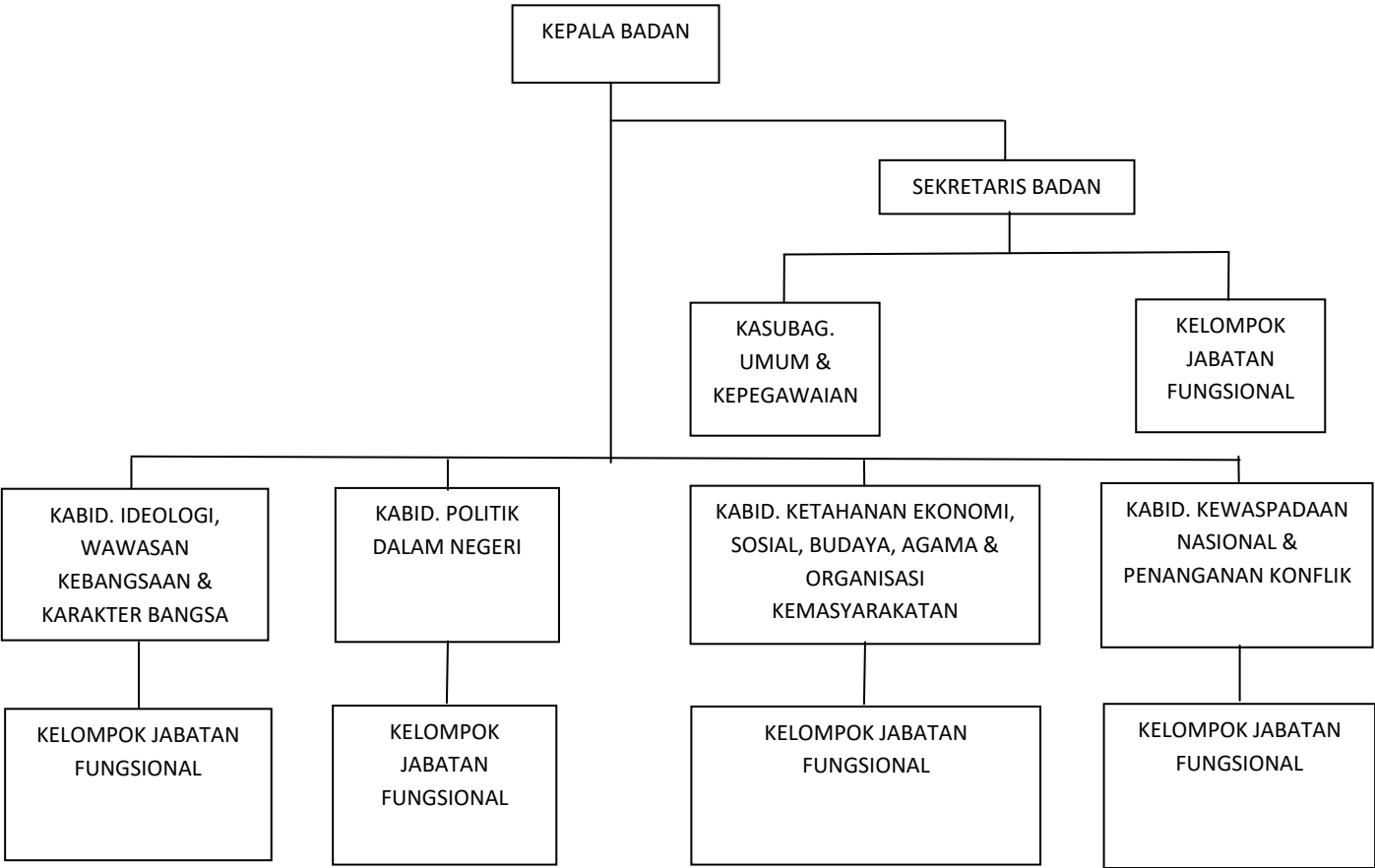
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan), di daerah Provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan), di daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan), di daerah Provinsi.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta serta penanganan konflik di wilayah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan), di daerah Provinsi
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sulawesi Barat



C. POTENSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Potensi Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Kesbang Kabupaten Mamuju, Kesbang Kabupaten Mamuju Tengah, Kesbang Kabupaten Pasangkayu, Kesbang Kabupaten Majene, Kesbang Kabupaten Polman dan Kesbang Kabupaten Mamasa dengan perincian sebagaimana pada,

Tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah :

Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
Mamasa	17	181	525	61.089	58.058	119.147	
Polewali Mandar	16	167	806	171.363	176.020	347.383	
Majene	8	82	399	62.203	64.226	126.429	
Mamuju	11	101	618	96.968	95.262	192.230	
Mamuju Tengah	5	54	275	49.484	47.714	97.198	
Pasangkayu	12	63	298	58.591	55.564	114.155	
Jumlah	69	648	2.921	499.698	496.844	996.542	

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024 sangat perlu dilakukan dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan meskipun Pemilu dan Pilkada Serentak masih akan berlangsung Tahun 2024 sehingga pada tabel diatas belum dapat kami isi data jumlah TPS Tapi , karena untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024 sangat perlu dilakukan. Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

Tabel 1.2. Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Bantuan Keuangan Partai Politik 2024 :

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Sah x 1.600 x 12 Bln	Yang Terima
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	34.480	1.600 x 12	55.168.000
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	41.979	1.600 x 12	67.166.400
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	26.988	1.600 x 12	43.180.00
Partai Amanat Nasional (PAN)	57.331	1.600 x 12	91.729.600

Partai Demokrat	125.013	1.600 x 12	200.020.800
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	74.287	1.600 x 12	118.859.200
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	96.081	1.600 x 12	153.729.600
Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)	89.814	1.600 x 12	143.702.400
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35.709	1.600 x 12	57.134.400
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	89.724	1.600 x 12	143.558.400

Total Jumlah Rp.1.074.249.600,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Pemilu 2019-2024 Periode Januari s/d September	Pemilu 2024-2029 Periode September s/d Desember
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	34.480	41.376.00	-
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	41.979	50.374.800	16.228.400
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	26.988	32.385.600	13.984.300
Partai Amanat Nasional (PAN)	57.331	68.797.200	34.433.600
Partai Demokrat	125.013	150.015.600	54.064.800
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	74.287	88.144.400	31.213.600
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	96.081	115.297.200	61.279.600
Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)	89.814	107.776.800	32.903.400
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35.709	42.850.800	21.918.00
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	89.724	107.668.800	28.003.600
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28.247	-	11.298.800

Total Jumlah Rp.1.111.018.800,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Tabel 1.3.Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Jumlah Ormas yang memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Provinsi Sulawesi Barat :

No.	Nama Ormas	Nomor & Tanggal SKT
1.	Yayasan Komunitas Sahabat Madani (Kosma)	1100.02.03/08/BKBP 10 Januari 2024
2	Wahda Islamiyah (NWDI) Sulbar	110.02.03/26/BKBP 12 Januari 2024
3	Perkumpulan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Sulbar	1100.02.03/27/BKBP 01 Desember 2024
4	Ketua Nahdlatul Wathan Prov. Sulbar	1100.02.03/34/BKBP 17 Januari 2024
5	DPP Pelangi Garuda Indonesia (PEGARINDO) Sulbar	1100.02.03/35/BKBP 17 Januari 2024

6	DPW Perkumpulan Peta Petani Indonesia Baru (PEPETANIBARU)	1100.02.03/35/BKBP 12 Januari 2024
7	Perkumpulan Mimbar Peradaban Indonesia (MABAR) Sulawesi Barat	1100.02.03/99.a/BKBP 01 Maret 2024
8	Perkumpulan Komunikasi Relawan Tatanan Ramah Bakti Kemanusiaan Sulbar	1100.02.03/16/BKBP 11 Maret 2024
9	Perkumpulan Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) Prov.Sulawesi Barat	1100.02.03/286/BKBP 21 Juli 2024
10.	Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	AHU - 0008112.AH.01.07 Tahun 2023
11.	Ketua Pemuda Bija Mangkasara	AHU – 0008652.AH.01.07 Tahun 2023
12.	Ketua The Real Legend Kiwal Garuda Hitam (Jasa Pengaman Dan Pengawakan)	AHU – 000328.AH.01.022 Tahun 2023
13.	Adat/Perkumpulan Arjang Binuang Mandar	AHU - 0001251-AH.01.07 TAHUN 2023

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat / golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Menurut Golongan.

Golongan						Jumlah
I	II	III	IV	VII	IX	
0	6	22	8	1	1	38

Tabel 2. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024.

Pendidikan					Jumlah
SLTP	SLTA	D1 s/d D3	S1	S2	
0	7	3	17	11	38

Tabel 3. Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
27	11	38

1) Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :

- Lemhanas	= 2 Orang
- Diklat PIM I	= -
- Diklatpim II	= 1 Orang
- Diklatpim III	= 4 Orang
- Diklatpim IV	= 9 Orang
- Diklat Prajabatan	= 22 Orang
Jumlah	= 38 Orang

2) Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut eselon adalah sebagai berikut:

- Eselon II	= 0 Orang
- Eselon III	= 5 Orang
- Eselon IV	= 1 Orang
- Fungsional	= 9 Orang
- Staf Pelaksana	= 23 Orang
Jumlah	= 38 Orang

E. SARANA DAN PRASARANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, dari segi saran dan prasarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja sumber daya yang dimiliki oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi barat tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ketahun masih diperlukan.

Saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jl. KH. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

Terhitung sejak Tanggal 05 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat atas ijin Surat dari Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H menempati Kantor Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat yang masih bertempat di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat yang dari terdiri atas 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (Satu) ruang Bendahara, 1 (Satu) ruang Sekretaris beserta 1 Kasubag. Umum dan Kepegawaian, 2 JF. Fungsional dan para stafnya, 1 (satu) ruang (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, 1 (satu) ruang Bidang Politik Dalam Negeri; serta 1 (Satu) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bergabung dengan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan). Ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti Televisi, Komputer Desktop, Laptop, Printer Meja Kerja Pimpinan, Meja kerja, Printer, Lemari Arsip dan Cctv ; (*Daftar Inventaris Barang Terlampir*).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Untuk itu, maka sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dengan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tujuan tersebut maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, gambaran umum, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, landasan hukum dan sistematika penyajian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis caaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Hubungan antar Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat. Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 yang termuat dalam Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat 20 Tahun kedepan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada pada lingkungan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Salah satu sumberdaya yang strategis dalam mengantisipasi berbagai stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan membangun SDM yang berkualitas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dimulai pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan maksud menyatukan gerak langkah seluruh unsur kesatuan bangsa dan politik untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Visi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 maka Visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

Visi :

“SULAWESI BARAT MAJU, MALAQBI & BERKELANJUTAN”

MISI :

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan keadilan sosial.
- Misi Kedua : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

- Misi Ketiga : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
 - Misi Keempat : Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing.
 - Misi Kelima : Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah.
 - Misi Keenam : Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - **Misi Ketujuh : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.**
 - Misi Kedelapan : Menegakkan supremasi hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban.
- Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah **Misi Kedua : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas** dan **Misi Ketujuh : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.**

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Sulawesi Barat Maju, Malaqbiq dan Berkelanjutan			
Misi 2 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fasilitas, SDM yang berkualitas dan berkinerja, mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dinamika nilai-nilai sosial budaya, agama, ekonomi, Ormas, pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan etika budaya politik serta fasilitas kelembagaan Partai Politik.	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai social budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi yang berkaitan tentang wawasan dan pengetahuan masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan yang berdemokrasi.	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berkinerja
	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	Melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	Tertanam rasa solidaritas pada masyarakat.
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, beragama dan golongan.	
		Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	

Misi 7 : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fasilitas, SDM yang berkualitas dan berkinerja, mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dinamika nilai-nilai sosial budaya, agama, ekonomi, Ormas, pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan etika budaya politik serta fasilitas kelembagaan Partai Politik.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	Mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi menjaga pentingnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Terciptanya stabilitas ilmu politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, ketentraman dan ketertiban.
	Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
	Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Mengadakan fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang stabil.	Peningkatan fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan antara penerima dan pemberian atas kinerja terukur berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Berikut dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sulawesi Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) Sub Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan yang didukung dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.82.620.644.059.00, dan Realisasi Anggaran Rp.82.124.971.501.00, (99,40%) dan sisa anggaran Rp.495.672.558.00,-.

Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SS 1.	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	90%
SS 2.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	90%
SS 3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	80%
SS 4.	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	80%
SS 5.	Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan parpol yang terverifikasi.	100 %
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	70%
		Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.	100%
SS 6.	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	100%
		Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	100%
SS 7.	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase angka kriminalitas yang tertangani.	100%

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
SS1	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ASN yang berkualitas dan berkinerja}}{\text{Jumlah ASN yang tidak berkualitas dan berkinerja}} \times 100\%$ = 90%	Sekretariat
SS2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah peserta yang paham antar suku, umat beragama dan golongan}}{\text{Jumlah peserta yang tidak paham antar suku, umat beragama dan golongan}} \times 100\%$ = 90%	Bldang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
SS3	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila}}{\text{Jumlah masyarakat yang tidak paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila}} \times 100\%$ = 80%	Bldang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
SS4	Meningkatnya wawasan tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan dan etika politik}}{\text{Jumlah masyarakat yang tidak dapat mengaktualisasikan pendidikan dan etika politik}} \times 100\%$ = 80%	Bidang Politik Dalam Negeri

SS5	Meningkatkan fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi	Formulasi pengukuran : Jumlah Parpol yang telah diverifikasi _____ x 100 Jumlah Parpol yang belum diverifikasi =100%	Bidang Politik Dalam Negeri
SS6	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	Formulasi pengukuran : Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika _____ x 100 Persentase Ormas yang tidak menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika = 100%	Bidang Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
		Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	Formulasi pengukuran : Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT _____ x 100 Persentase Ormas yang tidak terbina dan memperoleh SKT =100%	Bidang Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
SS7	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Formulasi pengukuran : Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditangani _____ x 100 Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tidak ditangan =100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	>85 – 100%	Baik
3	>65 – 85 %	Cukup
4	>50 – 65%	Kurang
5	50 %	Sangat Kurang

Dalam mengukur tingkat persentase Capaian Kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu sebagai berikut :

➤ Semakin tinggi realisasi maka pencapaian kinerja semakin baik :

Persentase pencapaian :
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

➤ Semakin tinggi realisasi semakin rendah pencapaian kinerja :

Persentase pencapaian :
$$\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 terdapat 7 (Tujuh) Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1) Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	98%	93,48%	93,48%	97,98%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 1.				93,48%	97,98%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pada sasaran strategis 1 :**Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya**, yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2024 yaitu sebesar 93,48% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan capaian kinerja sasaran strategi 1 tahun sebelumnya Tahun 2023 yaitu sebesar 97,98%, ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 5,5%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya beberapa sub kegiatan pada Bidang Sekretariat yang tidak dapat terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran untuk Pembayaran Honor Tim FORKOPIMDA.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengalami refocusing (pengurangan) sebanyak 3 kali.
3. Sasaran strategi 1 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja kesekretariatan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 5,5% dari tahun sebelumnya. Semakin turun realisasi maka tidak mempengaruhi atau mengurangi output daripada kinerja di bidang Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 2 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	90%	97,24%	97,24%	89,40%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 2.				97,24%	89,40%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pasa sasaran strategis 2 : **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 2 Tahun 2024 yaitu sebesar 97,24% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 2 tahun sebelumnya 2023 yaitu sebesar 89,40% ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 7,84%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Tidak adanya pergeseran anggaran pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yaitu pada beberapa sub kegiatan yang telah

teralisasi dengan baik, bahkan mendapat reward atas pelaksanaan PASKIBRAKA terlaksana dengan baik dengan diberikannya tambahan anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

2. Sasaran strategi 2 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat membawa dampak positif mendukung realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada realisasi kinerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 7,84% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi anggaran dan fisik maka akan mempengaruhi output daripada kinerja di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan semakin baik / cepat pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- 3) **Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 3 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	90%	97,24%	97,24%	89,40%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 3.				97,24%	89,40%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pada sasaran strategis 3 : **Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 3 Tahun 2024 yaitu sebesar 97,24% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 3 tahun sebelumnya 2023 yaitu sebesar 89,40% ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 7,84%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

- 1. Tidak adanya pergeseran anggaran pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yaitu pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik, bahkan mendapat reward atas pelaksanaan PASKIBRAKA terlaksana dengan baik dengan diberikannya tambahan anggaran.
- 2. Sasaran strategi 2 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat membawa dampak positif mendukung realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada realisasi kinerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 7,84% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi anggaran dan fisik maka akan mempengaruhi output daripada kinerja di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan semakin baik / cepat pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

4) **Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 4 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya	Persentase	80%	99,99%	99,99%	92,80%

wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.				
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 4.				99,99%	92,80%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pasa sasaran strategis 4 : **Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 4 Tahun 2024 yaitu sebesar 99,99% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 4 Tahun 2023 yaitu sebesar 92,80% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 7,19%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik pada sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sehingga aktivitas Kegiatan **Rapat FGD Indeks Demokrasi Indonesia** dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya pergeseran anggaran kas pada Belanja **Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik** yang awalnya di Triwulan II maka dilakukan pergeseran di Triwulan III dan 10 Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan regulasi yang dapat tersalurkan dengan baik. Dan mendapatkan tambahan anggaran pada sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada aktivitas **Pembentukan dan Operasional Tim Pemantauan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu & Pilkada 2024 (Desk Pilkada)**.
3. Sasaran strategi 4 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dan membawa dampak positif terhadap realisasi kinerja Bidang Politik Dalam Negeri daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 7,19% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5) **Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 5 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan parpol yang terverifikasi.	100 %	100,00%	100,00%	97,56%
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	70%	96,83 %	96,83%	85,03%
	Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.	100%	99,59 %	99,59%	94,25%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 5.				99,99%	92,80%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pada sasaran strategis 5 : **Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada** yang terdiri dari tiga indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 5 Tahun 2024 yaitu sebesar 99,99% atau kategori **baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 5 tahun

sebelumnya 2023 yaitu sebesar 92,80% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 7,19%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik pada sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sehingga aktivitas Kegiatan **Rapat FGD Indeks Demokrasi Indonesia** dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya pergeseran anggaran kas pada Belanja **Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik** yang awalnya di Triwulan II maka dilakukan pergeseran di Triwulan III dan 10 Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan regulasi yang dapat tersalurkan dengan baik. Dan mendapatkan tambahan anggaran pada sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada aktivitas **Pembentukan dan Operasional Tim Pemantauan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu & Pilkada 2024 (Desk Pilkada)**.
3. Sasaran strategi 4 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dan membawa dampak positif terhadap realisasi kinerja Bidang Politik Dalam Negeri daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 7,19% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

6) **Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 6 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	100%	96,59%	96,59%	97,54%
	Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	100%	96,25%	96,25%	99,30%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 6.				96,52%	98,42%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pada sasaran strategis 6 : **Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika** yang terdiri dari dua indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 6 Tahun 2024 yaitu sebesar 96,25% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 6 tahun sebelumnya 2023 yaitu sebesar 98,42% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 1,9%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, namun tidak terlepas daripada terealisasi aktivitas pada sub. kegiatan tersebut.
2. Sasaran strategi 6 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 1,9% dari tahun sebelumnya. Semakin rendah realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau mengurangi nilai output daripada kinerja di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan

sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7) **Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 7 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.8 : *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase angka kriminalitas yang tertangani.	100%	95,31%	95,31%	98,87%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 7.				95,31%	98,87%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pada sasaran strategis 7 : **Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 7 Tahun 2024 yaitu sebesar 95,31% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 7 tahun sebelumnya 2023 yaitu sebesar 98,87% ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja sebesar 3,56%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

- Adanya pergeseran anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi yaitu berupa aktivitas penambahan **Honor Tim Forkopimda** dan penambahan **Hibah Polda Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.**
- Sasaran strategi 7 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dari Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 3,56% dari tahun sebelumnya. Rendahnya realisasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka tidak mempengaruhi atau mengurangi nilai output dari kinerja di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tidak berarti tidak maksimalnya pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tabel 3.9 : Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024:

No.	Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	DAU APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	DAU APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	DAU APBD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	DAU APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	DAU APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran.	DAU APBD
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	DAU APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	DAU APBD
9	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.	DAU APBD
10	Penyediaan Bahan Material.	DAU APBD
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	DAU APBD
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	DAU APBD
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	DAU APBD
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	DAU APBD
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	DAU APBD
16	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.	DAU APBD
17	Pembentukan Paskibraka.	DAU APBD
18	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendidikan	DAU APBD

	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
20	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
21	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	DAU APBD
22	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	DAU APBD
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
24	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
25	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing,	DAU APBD

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	
26	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.	DAU APBD

3. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 memperoleh alokasi dana sebesar Rp.82.124.971.501.00,- (Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut, rincian Realisasi Anggaran persasaran :

- ❖ Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1.	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	136.524.100	131.797.600	96,54%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	4.166.734.399	4.136.592.167	99,28%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	96.027.500	0	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	690.898.400	537.924.271	77,86%

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	197.480.000	195.600.000	99,05
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	401.559.800	347.868.176	86.63%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	207.210.000	161.964.400	78,16%
Jumlah Total Pagu Sasaran 1			5.896.434.199	5.511.746.614	93,48

- ❖ Sasaran Strategi 2 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan; dan
- ❖ Sasaran Strategi 3 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

No.	SASARAN	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
2. & 3.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	2.188.990.000	2.128.465.882	97,24%

	harmonis antar suku, umat beragama dan golongan; dan Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.			
Jumlah Total Pagu Sasaran 2 dan 3			2.188.990.000	2.128.465.882	97,24%

- ❖ Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi; dan
- ❖ Sasaran Strategi 5 : Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
4. & 5.	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	54.175.100.860	54.171.997.137	99,99

	berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi; dan Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.			
Jumlah Total Pagu Sasaran 4 dan 5			54.175.100.860	54.171.997.137	99,99

❖ Sasaran Strategi 6 : Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
6.	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaa n Narkotika.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	600.194.900	579.305.696	96,52
Jumlah Total Pagu Sasaran 6			600.194.900	579.305.696	96,52

- ❖ Sasaran Strategi 7 : Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
7.	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	19.759.924.100	19.733.456s.172	99,87
Jumlah Total Pagu Sasaran 7			19.759.924.100	19.733.456.172	99,87

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun

2024 adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan;
3. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi, dengan OPD terkait dilingkup Provinsi Sulawesi Barat;
4. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama;
5. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/masyarakat tentang Sistem Demokrasi;
6. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga/masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi kemasyarakatan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris dan kepala bidang yang ada pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara lebih intensif untuk melakukan seleksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) / Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing agar lebih berkualitas.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim TAPD terkait pemberian

anggaran agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang jauh lebih baik ke depan.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se- Sulawesi Barat di 6 Kabupaten (Mamuju, Mateng, Pasangkayu, Majene, Polman dan Mamasa) di tingkat daerah; Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta beberapa instansi terkait tentang data-data tersebut.
4. Memberikan peningkatan, pengetahuan dan Bimbingan Teknis Intelijen bagi petugas intel kantor.
5. Membentuk tim-tim teknis terkait beberapa kegiatan untuk Penanganan Rawan Konflik, IDI, Verifikasi Parpol, FKDM, FKUB, FPK, Ormas, Pemantauan Orang Asing dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 (LKjIP-BKBP Prov. Sulbar Thn 2024) ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja, kegiatan pada waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 30 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya / IV.d

NIP : 19700701 199101 1 004

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT
KONDISI BULAN JANUARI s/d DESEMBER TA. 2024

UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER 2024
SUMBER DANA : APBD

No.					URAIAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT	PROGRES %					SISA PAGU	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET
										FISIK		KEUANGAN						
												REALISASI						
										REALISASI	TTB	Rp	%	TTB				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			82.620.644.059,00	100,00	99,40	99,40	82.124.971.501,00	99,40	99,40	495.672.558			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			82.620.644.059,00	100,00	99,40	99,40	82.124.971.501,00	99,40	99,40	495.672.558			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.896.434.199,00	7,14	93,48	6,67	5.511.746.614,00	93,48	6,67	384.687.585			
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			136.524.100,00	5,57	96,54	2,24	131.797.600,00	96,54	2,24	4.726.500			
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.		Mamuju	60.049.100,00	0,07	95,69	42,09	57.460.100,00	95,69	42,09	2.589.000			
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.		Mamuju	70.600.000,00	1,20	96,97	114,01	68.462.500,00	96,97	114,01	2.137.500			
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.		Mamuju	5.875.000,00	4,30	100,00	8,32	5.875.000,00	100,00	8,32	-			
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.			4.166.734.399,00	61,17	99,28	70,15	4.136.592.167,00	99,28	70,15	30.142.232			
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Mamuju	4.086.401.899,00	4,95	99,33	97,41	4.059.012.167,00	99,33	97,41	27.389.732			
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.		Mamuju	3.660.000,00	0,06	77,05	0,07	2.820.000,00	77,05	0,07	840.000			
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran.		Mamuju	76.672.500,00	56,16	97,51	1,79	74.760.000,00	97,51	1,79	1.912.500			
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.			96.027.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.027.500			
8	01	01	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.		Mamuju	96.027.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.027.500			

No.					URAIAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT	PROGRES %					SISA PAGU	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET
										FISIK		KEUANGAN						
												REALISASI						
										REALISASI	TTB	Rp	%	TTB				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah.			690.898.400,00	264,99	77,86	9,12	537.924.271,00	77,86	9,12	152.974.129			
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.		Mamuju	35.050.000,00	0,04	99,97	5,07	35.041.000,00	99,97	5,07	9.000			
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.		Mamuju	17.680.000,00	0,02	85,01	2,18	15.030.000,00	85,01	2,18	2.650.000			
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan / Material.		Mamuju	39.337.626,00	0,05	99,64	5,67	39.196.449,00	99,64	5,67	141.177			
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat.		Mamuju	440.095.494,00	0,53	98,74	62,90	434.556.822,00	98,74	62,90	5.538.672			
8	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.		Mamuju	158.735.280,00	264,34	8,88	2,04	14.100.000,00	8,88	2,04	144.635.280			
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.			197.480.000,00	0,24	99,05	99,05	195.600.000,00	99,05	99,05	1.880.000			
8	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		Mamuju	197.480.000,00	0,24	99,05	0,99	195.600.000,00	99,05	0,99	1.880.000			
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			401.559.800,00	0,49	86,63	0,42	347.868.176,00	86,63	0,42	53.691.624			
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.		Mamuju	342.475.000,00	0,41	89,83	76,61	307.642.000,00	89,83	76,61	34.833.000			
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.		Mamuju	59.084.800,00	0,07	68,08	10,02	40.226.176,00	68,08	10,02	18.858.624			
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			207.210.000,00	0,25	78,16	0,20	161.964.400,00	78,16	0,20	45.245.600			
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.		Mamuju	207.210.000,00	0,25	78,16	78,16	161.964.400,00	78,16	78,16	45.245.600			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI, PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.			2.188.990.000,00	2,65	97,24	2,58	2.128.465.882,00	97,24	2,58	60.524.118			

No.					URAIAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT	PROGRES %					SISA PAGU	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET
										FISIK		KEUANGAN						
												REALISASI						
										REALISASI	TTB	Rp	%	TTB				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.			2.188.990.000,00	2,65	97,24	2,58	2.128.465.882,00	97,24	2,58	60.524.118			
8	01	02	1.01	12	Pembentukan Paskibraka.		Mamuju	2.188.990.000,00	2,65	97,24	97,24	2.128.465.882,00	97,24	97,24	60.524.118			
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.			54.175.100.860,00	65,57	99,99	65,57	54.171.997.137,00	99,99	65,57	3.103.723			
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.			54.175.100.860,00	65,57	99,99	65,57	54.171.997.137,00	99,99	65,57	3.103.723			
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Mamuju	29.997.000,00	0,04	96,83	0,05	29.047.000,00	96,83	0,05	950.000			
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Mamuju	53.620.405.800,00	64,90	100,00	98,98	53.620.405.800,00	100,00	98,98	-			

No.					URAIAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT	PROGRES %					SISA PAGU	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET
										FISIK		KEUANGAN						
												REALISASI						
										REALISASI	TTB	Rp	%	TTB				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Mamuju	524.698.060,00	0,64	99,59	0,96	522.544.337,00	99,59	0,96	2.153.723			
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.			600.194.900,00	0,73	96,52	0,70	579.305.696,00	96,52	0,70	20.889.204			
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.			600.194.900,00	0,73	96,52	0,70	579.305.696,00	96,52	0,70	20.889.204			
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Mamuju	474.659.428,00	0,57	96,59	76,39	458.482.496,00	96,59	76,39	16.176.932			
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Mamuju	125.535.472,00	0,15	96,25	20,13	120.823.200,00	96,25	20,13	4.712.272			
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.			19.759.924.100,00	23,92	99,87	23,88	19.733.456.172,00	99,87	23,88	26.467.928			
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.			19.759.924.100,00	23,92	99,87	23,88	19.733.456.172,00	99,87	23,88	26.467.928			

No.						URAIAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT	PROGRES %					SISA PAGU	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET
											FISIK		KEUANGAN						
													REALISASI						
											REALISASI	TTB	Rp	%	TTB				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	06	1.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Mamuju	160.417.700,00	0,19	94,37	0,77	151.386.650,00	94,37	0,77	9.031.050			
8	01	06	1.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Mamuju	193.831.060,00	0,23	99,37	0,97	192.610.796,00	99,37	0,97	1.220.264			
8	01	06	1.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Mamuju	176.615.140,00	0,21	99,37	0,89	175.503.726,00	99,37	0,89	1.111.414			
8	01	06	1.01	06		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.		Mamuju	19.229.060.200,00	23,27	99,92	97,24	19.213.955.000,00	99,92	97,24	15.105.200			
JUMLAH TOTAL BELANJA									82.620.644.059,00	100,00	99,40	99,40	82.124.971.501,00	99,40	99,40	495.672.558,00		-	

Mamuju, 31 Desember 2024

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT

Drs. H. HERDIN ISMAIL, M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya / IV.d
NIP : 19700701 199101 1 004

